

Merawat Fondasi Kampung Pancasila: Penangkal Arus Patologi Digital Nasional

Mohammad Suud

Setiap kali kalender mendekati fajar 1 Juni, batin kolektif kita kembali dihangatkan oleh nyala api pusaka yang lahir delapan dekade silam: *Pancasila*. Ia bukan sekadar teks beku yang mendiami ruang-ruang upacara, melainkan jantung moralitas yang seharusnya berdenyut dalam setiap tarikan napas kehidupan berbangsa. Namun, menjelang peringatan di tahun 2026 ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa lanskap kebangsaan sedang mengalami pergeseran tektonik yang sunyi. Di balik megahnya arsitektur peradaban siber yang menjanjikan kemudahan, mengalir arus bawah yang membawa serta triangulasi patologi sosial digital – sebuah segitiga anomie yang mewujud dalam jerat finansial tak resmi, candu spekulasi virtual, dan pelarian semu zat adiktif [1]. Di sinilah *Kampung Pancasila* mesti hadir, bukan lagi sebagai papan nama administratif, melainkan sebagai oase etis yang membumi untuk memeluk kembali jiwa-jiwa yang teralienasi oleh dinginnya layar digital.

Realitas hari ini memperlihatkan bahwa ruang privat masyarakat sedang dikepung oleh tiga kabut gelap yang saling berkelindan. Pertama, hadirnya ilusi kemudahan finansial digital yang lambat laun mengikis kemandirian ekonomi warga melalui jerat pinjaman tak resmi. Ketidakberdayaan ini acap kali berkelanjutan pada kabut kedua, yaitu pusaran spekulasi virtual yang menjanjikan kesenangan semu namun merapuhkan etos kerja serta kejujuran batin [2]. Manakala ruang psikologis kian terhimpit oleh kecemasan dari dua perangkap digital tersebut, pelarian semu pada zat adiktif acap menjadi pilihan tragis yang merenggut fajar masa depan generasi muda. Ketiga fenomena ini tidak lagi berdiri sendiri; mereka telah membentuk sebuah segitiga patologi yang mengisolasi manusia dari kehangatan komunal dan menyisakan sunyi yang destruktif.

Menghadapi kepungan kabut digital tersebut, kita tak boleh membiarkan masyarakat berjuang dalam kesendirian yang pasrah. Di sinilah *Kampung Pancasila* menemukan urgensi eksistensinya sebagai sebuah ekosistem pemulihan yang berbasis nilai luhur. Melalui reaktualisasi fondasi kemanusiaan dan persatuan, kampung harus menjelma menjadi ruang hidup yang peka, di mana tradisi kepedulian antartetangga dihidupkan kembali untuk merangkul mereka yang mulai mengisolasi diri [3]. Ketika sebuah komunitas mampu mendeteksi dini perubahan perilaku warganya dengan penuh empati, maka tembok alienasi yang diciptakan oleh dunia siber dapat diruntuhkan. Sentuhan manusiawi inilah yang menjadi langkah awal untuk membasuh luka psikologis saudara-saudara kita yang sempat tersesat di dalam labirin maya.

Ketahanan sebuah komunitas tak hanya bersandar pada kepekaan sosial, melainkan juga pada kemandirian ekonomi yang berkeadilan. *Kampung Pancasila* mesti mengejawantahkan amanat sila kelima dengan menghadirkan literasi keuangan berbasis komunal sebagai penawar langsung terhadap jerat finansial digital. Melalui penguatan kelembagaan lokal seperti koperasi warga atau lumbung ekonomi desa, masyarakat disediakan jembatan yang aman untuk saling menopang dalam pemenuhan kebutuhan hidup [4]. Langkah ini bukan sekadar upaya penyelamatan finansial, melainkan sebuah ikhtiar etis untuk memutus ketergantungan pada entitas pemberi pinjaman tak resmi yang acap kali merampas martabat kemanusiaan. Dengan tumbuhnya kedaulatan ekonomi di tingkat akar rumput, kabut spekulasi virtual dengan sendirinya akan kehilangan daya pikatnya di hadapan etos kerja yang sehat dan penuh berkah.

Pada akhirnya, merawat fondasi *Kampung Pancasila* adalah sebuah ikhtiar suci untuk menjaga nyala api kemanusiaan di tengah badai peradaban siber [5]. Pancasila tak boleh dibiarkan mandek sebagai untaian kalimat yang agung di atas kertas, melainkan harus mewujud menjadi pelindung yang nyata bagi setiap warga di tingkat akar rumput. Menyambut 1 Juni 2026, urgensi kita bukan lagi sekadar merayakan kelahiran sebuah ideologi, melainkan membuktikannya sebagai benteng komunal yang hidup. Hanya dengan cara demikian, kita dapat menghalau kabut patologi digital nasional dan mengembalikan kehangatan sejati interaksi manusia dari dinginnya alienasi dunia virtual, demi memeluk kembali jiwa-jiwa bangsa dalam pelataran yang damai dan bermartabat.

Endnotes:

[1] Kemkomdigi dan OJK; BNN bersama BRIN dan BPS. Pengkondisian triangulasi patologi siber (Pinjol, Judol, Narkoba) merujuk pada data eskalasi krisis sosial-digital nasional menjelang tahun 2026.

[2] Durkheim, Émile. (1893). *The Division of Labour in Society*. Kerangka Teori Anomie untuk membedah mudarnya norma sosial akibat disrupsi ruang siber digital yang memicu perilaku menyimpang.

[3] Putnam, Robert D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Teori Modal Sosial (*Social Capital*) mengenai pentingnya penguatan jaringan komunal (*bonding*) sebagai jaring pengaman sosial warga.

[4] Midgley, James. (1995). *Social Development: The Social Development Perspective in Social Welfare*. Teori Pembangunan Sosial yang menekankan harmonisasi antara dimensi sosial dan intervensi ekonomi lokal secara berkeadilan.

[5] Canda, Edward R., & Furman, Leola Dyrli. (2010). *Spiritual Diversity in Social Work Practice: The Heart of Helping*. Pendekatan intervensi spiritualitas eksistensial untuk memulihkan martabat dan kedamaian batin individu dari alienasi sosial.